



BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I TA 2026



SATKER 693160

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Depok, 04 Mei 2026
Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,



Jusman

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	II
Pernyataan Tanggung Jawab	III
Ringkasan	IV
I. Laporan Realisasi Anggaran	1
II. Neraca	2
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	4
V. Catatan atas Laporan Keuangan	5
A. Penjelasan Umum	5
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	46
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	54
F. Pengungkapan Penting Lainnya	58
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Jalan Raya Gandul No.4 Cinere Depok 16512

Telepon: (021) 7540077

Laman: <https://bpsdm.kemenkum.go.id>, Pos-el: bpsdm@kemenkum.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2026 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum selaku UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Depok, 04 Mei 2026

Sekretaris Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum,



Jusman

Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Semester I Tahun 2026 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan serta telah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini meliputi :

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 01 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara Semester I TA 2026 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.599.034.776,00 atau 171,4 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp979.150.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada Semester I TA 2026 adalah sebesar Rp40.411.066.389,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp89.591.794.000,00.

NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp815.277.056.190,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp768.642.962,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp814.508.413.228,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.941.507.257,00 dan Rp823.749.765.062,00.

LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode

sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp1.090.413.635,00 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp47.137.179.327,00 sehingga terdapat Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp46.046.765.692,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit sebelum Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp526.032.212,00 dan (Rp45.520.733.480,00) sehingga entitas mengalami Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp45.520.733.480,00).

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas awal pada tanggal 01 Januari 2026 adalah sebesar Rp1.099.958.342.006,00 dikurangi Surplus Defisit-LO sebesar (Rp45.520.733.480,00) ditambah dengan kenaikan/penurunan entitas senilai (Rp286.622.793.073,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp241.102.059.593,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp813.335.548.933,00.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Semester I TA 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Cat.	TA 2026		%	TA 2025
		Anggaran	Realisasi		Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	979.150.000	1.599.034.776	163,31	539.487.205
Jumlah Pendapatan dan Hibah		979.150.000	1.599.034.776	163,31	539.487.205
Belanja	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	23.127.834.000	12.244.426.795	52,94	11.644.923.473
Belanja Barang	B.4	50.165.335.000	23.126.228.939	46,10	23.726.491.680
Belanja Modal	B.5	16.298.625.000	5.040.410.655	30,93	2.198.569.350
Jumlah Belanja		89.591.794.000	40.411.066.389	45,11	37.569.984.503

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM NERACA PER 30 JUNI 2026 DAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2	300.000.000	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	60.578.260	-
Persediaan	C.10	408.064.702	516.009.615
JUMLAH ASET LANCAR		768.642.962	516.009.615
ASET TETAP			
Tanah	C.14	687.998.681.000	687.998.681.000
Peralatan dan Mesin	C.15	120.087.627.319	120.051.282.924
Gedung dan Bangunan	C.16	125.594.619.872	424.753.091.148
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.17	3.675.485.543	13.275.880.497
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	6.172.015.039	1.775.158.009
Aset Tetap lainnya	C.19	1.468.896.867	1.468.896.867
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.20	(130.488.912.412)	(149.569.562.723)
JUMLAH ASET TETAP		814.508.413.228	1.099.753.427.722
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	1.476.732.100	1.476.732.100
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22	-	2.709.193.903
Aset Lain-Lain	C.22	2.522.415.500	8.418.770.029
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.23	(3.999.147.600)	(9.883.242.179)
JUMLAH ASET LAINNYA		-	2.721.453.853
JUMLAH ASET		815.277.056.190	1.102.990.891.190
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.24	1.567.237.817	3.015.138.113
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.24	74.269.440	-
Pendapatan Diterima Dimuka	C.24	-	17.411.071
Uang Muka dari KPPN	C.25	300.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		300.000.000	3.032.549.184
JUMLAH KEWAJIBAN		1.941.507.257	3.032.549.184
EKUITAS			
Ekuitas	C.29	813.335.548.933	1.099.958.342.006
JUMLAH EKUITAS		813.335.548.933	1.099.958.342.006
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		815.277.056.190	1.102.990.891.190

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Cat.	2026	2025
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.090.413.635	46.666.688
JUMLAH PENDAPATAN		1.090.413.635	46.666.688
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	13.538.485.082	12.854.060.967
Beban Persediaan	D.3	410.588.737	354.960.790
Beban Barang dan Jasa	D.4	17.392.630.487	15.762.735.211
Beban Pemeliharaan	D.5	3.865.362.483	7.729.014.367
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.515.896.409	628.050.509
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	10.414.216.129	11.568.845.840
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(144.696)
JUMLAH BEBAN		47.137.179.327	48.897.522.988
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN KEGIATAN NON OPERASIONAL		(46.046.765.692)	(48.850.856.300)
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	D.12	203.960.250	341.436.000
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional Lainnya	D.12	322.071.962	136.591.328
JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12	526.032.212	478.027.328
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR POS LUAR BIASA		(45.520.733.480)	(48.372.828.972)
Beban Luar Biasa		-	-
POS LUAR BIASA		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(45.520.733.480)	(48.372.828.972)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 2025

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2026	2025
EKUITAS AWAL	E.1	1.099.958.342.006	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(45.520.733.480)	(48.372.828.972)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.10	(241.102.059.593)	1.125.351.888.493
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(286.622.793.073)	1.076.979.059.521
EKUITAS AKHIR	E.14	813.335.548.933	1.076.979.059.521

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum***Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

BPSDM Hukum merupakan ujung tombak organisasi Kementerian Hukum, dalam hal pengembangan Aparatur Hukum, sehingga organisasi ini dituntut untuk dapat memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan pengetahuan, keterampilan dan sikap ASN agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Hukum dengan sebaik-baiknya.

Kementerian Hukum merupakan Kementerian yang mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, maka Kementerian Hukum memiliki lingkup kerja yang sangat beragam, seperti bidang pemasyarakatan, bidang keimigrasian, bidang kekayaan intelektual, bidang administrasi hukum umum, pembinaan hukum nasional, peraturan perundang-undangan, penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) hak asasi manusia. Keragaman dan kompleksitas tugas ini tentunya memerlukan berbagai kecakapan dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif maupun teknis yang didasari oleh Ilmu Pengetahuan dan Keterampilan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di bidang Hukum, dengan lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*), lebih murah (*cheaper*), dan terbaru (*newer*).

Permasalahan Hukum di Indonesia semakin dinamis dan kompleks. Masyarakat saat ini memiliki pemahaman dan daya kritis yang cukup tinggi di bidang Hukum. Perhatian dan tuntutan masyarakat terhadap permasalahan pelayanan tahanan dan warga binaan pemasyarakatan, pelayanan keimigrasian, pelayanan kekayaan intelektual, pelayanan jasa hukum dan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan (P5) HAM serta tugas Kementerian Hukum lainnya, sehingga bila tidak diantisipasi dan direspon dengan cepat, tepat, akurat dan akuntabel, akan dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Kementerian Hukum. Oleh karena itu, pegawai Kementerian Hukum dan pihak lain yang melaksanakan tugas di bidang Hukum, dituntut untuk senantiasa mengembangkan kompetensi dan profesionalismenya

dalam pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat. Kondisi di atas menjadi tantangan bagi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum untuk mewujudkan seluruh SDM Hukum yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, pelatihan teknis substantif, teknis fungsional dan pelatihan hak asasi manusia.

Selain menyelenggarakan kegiatan diklat, BPSDM Hukum juga melaksanakan assessment center untuk mendapatkan informasi dan pemetaan kompetensi (*soft competency*) yang dimiliki pegawai Kementerian Hukum, dan yang dapat digunakan sebagai informasi yang memadai bagi pimpinan untuk keperluan promosi, rotasi, mutasi, pengembangan SDM untuk pembinaan karir pegawai di lingkungan Kementerian Hukum.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam pelaksanaan tugasnya juga bertanggung jawab meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Sumber Daya Manusia bukan saja bagi pegawai Kementerian Hukum, tetapi juga sumber daya manusia di bidang Hukum yang berada di instansi lain antara lain perancang peraturan perundang-undangan, penyuluh hukum, aparat penegak hukum lainnya untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Sebagai konsekuensi transformasi organisasi, ke depannya BPSDM Hukum harus mampu mengantisipasi tantangan tugas pengembangan SDM Hukum yang semakin kompleks dalam menghadapi dinamika persoalan Hukum masyarakat Indonesia dan internasional. Melalui transformasi organisasi ini, diharapkan kegiatan pelaksanaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang dilaksanakan Kementerian Hukum dapat lebih implementatif, adaptif (*relevan*), mudah diakses, dan berdampak tinggi.

Tujuan :

“Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia”

Sasaran :

-
- Seluruh aparaturnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya dan memperoleh pengembangan karir yang jelas.
 - Seluruh unit kerja memiliki sumber daya manusia profesional sesuai kebutuhan dan kaderisasi berkesinambungan.
-

Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Pendekatan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan

Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Semester I Tahun 2026 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang meliputi wilayah serta satuan kerja bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Hukum. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Jasa Giro dan Pendapatan Lain-lain
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- a. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- c. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- a. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - a. harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan

dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Penjelasan atas
Pos Laporan
Realisasi
Anggaran

Selama periode Semester I TA 2026, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Revisi yang dilakukan berupa revisi dengan kewenangan Ditjen. Anggaran, Kanwil Perbendaharaan, dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran serta merubah jumlah PAGU Anggaran DIPA awal. Perincian Anggaran awal dan setelah revisi berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026	
	Anggaran	Anggaran
	Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	979.150.000	979.150.000
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	979.150.000	979.150.000
Belanja		
Belanja Pegawai	20.551.448.000	23.127.834.000
Belanja Barang	59.896.260.000	50.165.335.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	16.597.960.000	16.298.625.000
Jumlah Belanja	97.045.668.000	89.591.794.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi
Pendapatan
Rp1.599.034.776,
00

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.599.034.776,00 atau mencapai 163,31% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp979.150.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan BPSDM Hukum per 30 Juni 2026

Uraian	30 Juni 2026		
	Estimasi	Realisasi	% Real Pendapatan
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	150.000.000	496.765.214	331,18
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	829.150.000	780.197.600	94,1
Pendapatan Lain-Lain	-	322.071.962	infinity
Jumlah	979.150.000	1.599.034.776	163,31

Realisasi Pendapatan TA 2026 mengalami kenaikan sebesar 296,4% dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada TA 2025. Hal ini

disebabkan karena satuan kerja baru (Kode Satker Baru) yang aktif di TA 2026.

Pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Jenis pendapatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum antara lain :

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha berasal dari penjualan peralatan dan mesin, juga atas sewa tanah, gedung dan bangunan serta pemindahtanganan BMN lainnya.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi berasal dari Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan.
3. Pendapatan Lain-lain yang berasal dari Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah, Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu dan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu.

Realisasi Pendapatan 30 Juni TA 2026 sebesar Rp1.599.034.776,00 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha terdiri dari:
 - a. Realisasi pada Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121) sebesar Rp28.160.000,00 berupa Pendapatan atas Penjualan Bongkaran Renovasi Eks Gedung POLTEKPIN.
 - b. Realisasi pada Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp175.800.250,00 berupa Pendapatan atas Penjualan 2 unit Mini Bus dan 2 unit Sepeda Motor.
 - c. Realisasi pada Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp183.375.000,00 yang terdiri dari pendapatan atas auditorium, flat, asrama.
 - d. Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp109.429.964,00 terdiri dari :
 - Pendapatan sewa kamar asrama sebesar Rp104.564.964,00
 - Pendapatan sewa kamar flat sebesar Rp4.865.000,00.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp780.197.600,00 berasal dari Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (425429) merupakan pendapatan atas pelaksanaan penilaian kompetensi kepada pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum.

3. Pendapatan Lain-lain terdiri dari:

- a. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp28.186.280,00 yang merupakan pengembalian atas Uang Makan Pegawai atas temuan audit BPK.
- b. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp293.865.682,00 merupakan penyetoran kembali ke kas negara atas temuan pemeriksaan BPK atas belanja barang atas perjalanan dinas, sewa kendaraan, pengembalian kelebihan pembayaran jasa *outsourcing* tenaga alih daya TA. 2025.
- c. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar Rp20.000,00 merupakan penyetoran kembali ke kas negara atas kelebihan pembayaran jasa konsultansi manajemen konstruksi pekerjaan pembangunan Gedung Rektorat B Politeknik Tangerang BPSPDM Hukum dan HAM TA. 2024 (PT.Primega Saniyya Lestari) yang tidak sesuai kontrak.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja Realisasi Belanja pada 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp40.411.066.389,00 atau 45,11% dari anggaran belanja sebesar Rp89.591.794.000,00. Rendahnya realisasi tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan efisiensi/blokir anggaran yang cukup besar sehingga berdampak pada ketersediaan anggaran banyak berkurang. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni TA 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2026

Uraian	TA 2026		%
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Pegawai	23.127.834.000	12.245.167.368	52,95
Belanja Barang	50.165.335.000	23.127.948.939	46,10
Belanja Modal	16.298.625.000	5.040.410.655	30,93
Total Belanja Kotor	89.591.794.000	40.413.526.962	45,11
Pengembalian Belanja	-	2.460.573	-
Total Belanja	89.591.794.000	40.411.066.389	45,11

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2026
(PAGU Setelah Efisiensi/Blokir)*

URAIAN	TA 2026		%
	PAGU EFEKTIF	REALISASI	
Belanja Pegawai	23.127.834.000	12.245.167.368	52,95
Belanja Barang	50.165.079.005	23.127.948.939	46,10
Belanja Modal	16.298.625.000	5.040.410.655	30,93
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	89.591.538.005	40.413.526.962	45,11
Pengembalian Belanja	-	2.460.573	-
Total Belanja	89.591.538.005	40.415.987.535	45,11

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp12.244.426.795
,00*

Realisasi Belanja Pegawai 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp12.244.426.795,00 dan Rp11.644.923.473,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Realisasi Anggaran Belanja Pegawai
per 30 Juni 2026*

Kode	Rincian Belanja	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Neto	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	13.123.992.000	7.392.922.280	-	7.392.922.280	56,33
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	184.000	102.205	573	101.632	55,55
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	802.988.000	451.676.950	-	451.676.950	56,25
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	226.994.000	127.263.533	-	127.263.533	56,06
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	341.070.000	181.440.000	-	181.440.000	53,20
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.985.343.000	1.076.182.000	-	1.076.182.000	54,21
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	210.306.000	173.918.056	-	173.918.056	82,70
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	602.463.000	338.708.340	-	338.708.340	56,22
511129	Belanja Uang Makan PNS	2.440.290.000	743.683.000	-	743.683.000	30,48
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	252.190.000	140.675.000	740.000	139.935.000	55,78
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.227.335.000	685.163.594	-	685.163.594	55,83
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	22.000	12.778	-	12.778	58,08
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	52.221.000	29.007.820	-	29.007.820	55,55
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	16.123.000	8.947.546	-	8.947.546	55,50
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	86.451.000	49.400.000	-	49.400.000	57,14
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	61.933.000	34.459.850	-	34.459.850	55,64
511628	Belanja Uang Makan PPPK	255.764.000	86.961.000	-	86.961.000	34,00
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	22.750.000	11.510.416	-	11.510.416	-
512211	Belanja Uang Lembur	1.312.202.000	671.007.000	-	671.007.000	51,14
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	107.213.000	42.126.000	-	42.126.000	39,29
	Jumlah	23.127.834.000	12.245.167.368	740.573	12.244.426.795	52,95

Pada laporan realisasi anggaran yang berakhir per 30 Juni TA 2026 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp740.573,00 atas pembulatan gaji PNS dan Tunjangan Umum PNS.

B.4 Belanja Barang

*Belanja Barang
Rp23.126.228.939
,00*

Realisasi Belanja Barang 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp23.126.228.939,00 dan Rp23.726.491.680,00. Persentase realisasi belanja barang sebesar 46,1% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.165.335.000,00. Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Berikut tabel perbandingan realisasi belanja barang BPSDM Hukum per 30 Juni 2026:

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2026

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
5211	Belanja Barang Operasional	20.087.066.000	9.048.638.393	-	9.048.638.393
5212	Belanja Barang Non Operasional	5.352.661.000	2.252.878.258	-	2.252.878.258
5218	Belanja Persediaan	179.456.000	91.635.597	-	91.635.597
5221	Belanja Jasa	13.489.087.000	6.322.961.956	-	6.322.961.956
5231	Belanja Pemeliharaan	8.965.653.000	3.906.926.326	-	3.906.926.326
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.091.412.000	1.504.908.409	1.720.000	1.503.188.409
	Jumlah	50.165.335.000	23.127.948.939	1.720.000	23.126.228.939

Terdapat pengembalian belanja sebesar Rp1.720.000,00 merupakan Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa (524111).

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal
Rp5.040.410.655,
00

Realisasi Belanja Modal 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp5.040.410.655,00 dan Rp2.198.569.350,00. Persentase realisasi belanja barang sebesar 30,93% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp16.298.625.000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2026

Uraian	Anggaran	Realisasi Bruto	Pengembalian	Realisasi Netto
Belanja Modal Tanah	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	742.665.000	643.553.625	-	643.553.625
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.555.960.000	4.396.857.030	-	4.396.857.030
Belanja Modal Lainnya	-	-	-	-
Jumlah	16.298.625.000	5.040.410.655	-	5.040.410.655

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah Rp0,00 Realisasi Belanja Modal Tanah pada 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp643.553.625,00 Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan atau perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin, termasuk biaya perolehan, pengangkutan, instalasi, dan biaya lain yang diperlukan agar peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp643.553.625,00 dan Rp315.199.977,00. Persentase realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 86,65% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp742.665.000,00.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp4.396.857.030,00 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 sebesar Rp4.396.857.030,00 dan Rp5,859,424,412,00. Persentase realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 28,26% dari jumlah anggaran Rp15.555.960.000,00 berupa penambahan nilai gedung atas renovasi gedung kelas pendidikan.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp0,00 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dengan anggaran sebesar Rp0,00.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya Rp0,00 Belanja Modal Lainnya merupakan pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan Jalan, irigasi, jaringan dan lain-lain. Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni TA 2026

adalah sebesar Rp0,00.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

*Belanja
Bantuan Sosial
Rp0,00*

Belanja Bantuan Sosial adalah belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni TA 2026 adalah sebesar Rp0,00.

B.7 Capaian Output Prioritas Nasional

*Capaian Output
Prioritas
Nasional
Pelatihan
Fungsional Analisis
Hukum dan
Training of
Facilitator (ToF)
Implementasi
KUHP*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 yang menjadi pedoman utama kementerian dalam menyusun target dan sasaran kinerja tahunan, pada kementerian hukum terdapat alokasi anggaran untuk prioritas nasional (PN) yaitu pada PN Nomor 7 Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

Pada BPSDM Hukum terdapat 2 (Dua) Program Prioritas Nasional yaitu Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah serta *Training of Facilitator (ToF)* Implementasi KUHP.

Capaian Output Prioritas Nasional VII Kementerian Hukum pada BPSDM Hukum untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2026

Program/Kegiatan Prioritas	Pagu	Realisasi	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Pusat dan Daerah	813.068.000	371.574.288	45,70%	Orang	120	30	25%
Training of Facilitator (ToF) Implementasi KUHP	1.643.781.000	789.527.682	48,03%	Orang	246	92	37%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp300.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp300.000.000,00 dan Rp0,00. yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp60.578.260,00

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp60.578.260,00 dan Rp0,00.

C.4 Piutang PNB

Piutang PNB Rp0,00

Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang PNB per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp0,00

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan

atau kurang. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,00*

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih–Piutang
Lancar
Rp0,00*

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00.

C.8 Beban Dibayar di Muka

*Beban Dibayar
di Muka
Rp0,00*

Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya Saldo Beban Dibayar di Muka 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,00*

Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Realisasi Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.10 Persediaan

*Persediaan
Rp408.064.702,00*

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp408.064.702,00 dan Rp516.009.615,00.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan TP/TGR Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat
Rp0,00 kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni TA 2026 dan 31 Desember TA 2025 sebesar Rp0,00.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima
Penjualan dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai
Angsuran pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara
Rp0,00 penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Penyisihan Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi
Piutang Tak atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti
Tertagih – Piutang Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan
Non Lancar oleh kualitas masing-masing piutang. Saldo Penyisihan Piutang Tak
Rp0,00 Tertagih-Piutang Non Lancar per 30 Juni 2026 dan 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp0,00.

C.14 Tanah

Tanah Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pengembangan Sumber
Rp687.998.681. Daya Manusia Hukum per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah
000,00 sebesar Rp687.998.681.000,00. Aset Tetap Tanah pada BPSDM Hukum adalah sebagai berikut:

- Luas Tanah BPSDM Hukum secara keseluruhan 103.770 m² terletak di Jalan Raya Gandul No.4, Cinere, Depok.
- Tanah seluas 2.559 m² terletak di Jalan Percetakan Negara VII No.27, Rawasari, Jakarta Pusat.

- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Sulawesi Utara Tanah seluas 3.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Utara terletak di Jalan Manembo-nembo, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung Sulawesi Utara.
- Aset tanah pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah Tanah seluas 51.604m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terletak di Jalan Muhammad Ikhsan, Semarang Jawa Tengah.
- Aset tanah lainnya pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepulauan Riau seluas 40.000m² yang didapat dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terletak di Telaga Punggur – Pantai Timur Kabil Batam dimana status kepemilikan dalam proses sertifikasi Balik Nama di BPN.

C.15 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp120.087.627.319
,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp120.087.627.319,00 dan Rp120.051.282.924,00. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 01 Januari 2026	Rp 120.051.282.924
Mutasi tambah:	689.404.395
Pembelian	689.404.395
Mutasi kurang :	653.060.000
Penghentian aset dari penggunaan	653.060.000
Saldo per 30 Juni 2026	Rp 120.087.627.319
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	Rp (81.719.763.985)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	Rp 38.367.863.334

Mutasi Tambah mencakup pembelian alat kesehatan serta alat elektronik, yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai pada satker BPSDM Hukum sebesar Rp689.404.395,00 terdiri dari :

1. Pembelian sebesar Rp689.404.395,00 mencakup pembelian yang nilainya signifikan (memenuhi batasan nilai satuan minimal kapitalisasi) dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai berupa 4 unit Tensimeter, 2 unit Alat Kedokteran Umum Lainnya, 27 unit PC, 2 unit Laptop.

Mutasi kurang Peralatan dan Mesin sebesar Rp653.060.000,00 dengan

rincian :

1. Penghentian aset dari penggunaan sebesar Rp653.060.000,00 berupa Sound System 1 unit.

Rincian Peralatan dan Mesin tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.16 Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan
Rp125.594.619.872,
00*

Saldo gedung dan bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp125.594.619.872,00 dan Rp424.753.091.148,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	424.753.091.148
Mutasi kurang:	299.158.471.276
Transfer Keluar	299.158.471.276
Saldo per 30 Juni 2026	125.594.619.872
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(45.701.585.854)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	79.893.034.018

Mutasi Kurang sebesar Rp299.158.471.276,00 merupakan transfer keluar berupa 2 unit Bangunan Gedung Kantor Permanen senilai Rp 109.337.984.293,00; 4 unit Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen senilai Rp8.154.543.895,00; 1 unit Bangunan Gedung Pertemuan Permanen senilai Rp52.132.439.812,00; 3 unit Bangunan Gedung Pendidikan Permanen senilai Rp69.716.913.085,00 ; 1 unit Gedung Olah Raga Tertutup Permanen senilai Rp28.844.239.723,00; dan 1 unit Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya senilai Rp307.230.000,00 dari BPSDM Hukum kepada BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan, 2 unit Flat/Rumah Susun Permanen senilai Rp26.981.118.468,00, 1 unit Pagar Permanen Tugu/ Tanda Batas senilai Rp3.684.002.000,00 dari BPSDM Hukum kepada BPSDM Imigrasi dan Pemasarakatan.

Rincian Gedung dan Bangunan tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

*Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Rp3.675.485.543,
00*

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp3.675.485.543,00 dan Rp13.275.880.497,00.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	13.275.880.497
Mutasi kurang:	9.600.394.954
Transfer Keluar	9.600.394.954
Saldo per 30 Juni 2026	3.675.485.543
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(3.031.134.973)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	644.350.570

Mutasi Kurang sebesar Rp9.600.394.954,00 merupakan transfer keluar Jalan senilai Rp8.657.297.854,00 berupa 10.187 m² jalanan khusus komplek dan 1 unit Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil senilai Rp943.097.100,00 dari BPSDM Hukum kepada BPSDM Imigrasi dan Masyarakat.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap
Lainnya
Rp1.468.896.867,
00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.468.896.867,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	1.468.896.867
Mutasi tambah:	-
Likuidasi Masuk	-
Saldo per 30 Juni 2026	1.468.896.867
Akumulasi Penyusutan s.d.30 Juni 2026	(36.427.600)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	1.432.469.267

Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya antara lain koleksi perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, sebesar Rp1.468.896.867,00 terdiri dari :

1. Bahan perputakaan cetak senilai Rp1.379.249.267,00 berupa 1 Monografi, 2 Referensi; dan 794 Buku;
2. Barang Bercorak Kesenian senilai Rp36.427.600,00 berupa 5 buah alat musik modern/band;
3. Kartografi, Naskah dan Lukisan senilai Rp48.220.000,00 berupa 1 buah naskah/ manuskrip berbahan kertas;
4. Pahatan senilai Rp5.000.000,00 dengan total sebanyak 1 buah pahatan logam.

Rincian Aset Tetap Lainnya tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp6.172.015.039
,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp6.172.015.039,00 dan Rp1.775,158.009,00. Kontruksi dalam Pengerjaan terdiri dari Kegiatan Konsiyering Persiapan Konstruksi senilai Rp97.710.000,00; Perjalanan Dinas Pengelola Teknis senilai Rp11.706.100,00; Perjalanan Dinas Kualifikasi dan Negosiasi Teknis senilai Rp22.168.510,00; dan Perjalanan Dinas Evaluasi dan Pembuktian Kualifikasi Pengadaan senilai Rp12.305.620,00 serta pembayaran Jasa Konstruksi PT Reksa Tiga Mitra senilai Rp4.252.966.800,00.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp130.488.912.412
,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah Rp130.488.912.412,00 dan Rp149.569.562.723,00.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	120.087.627.319	81.719.763.985	38.367.863.334
2	Gedung dan Bangunan	125.594.619.872	45.701.585.854	79.893.034.018
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.675.485.543	3.031.134.973	644.350.570
4	Aset Tetap Lainnya	1.468.896.867	36.427.600	1.432.469.267
Total		250.826.629.601	130.488.912.412	120.337.717.189

C.21 Aset Tak Berwujud

Aset Tak
Berwujud
Rp1.476.732.100,
00

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.476.732.100,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Rincian masing-masing pos ATB yang

signifikan terdapat pada lampiran.

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2026

No.	Uraian	Nilai
1	Software Komputer	Rp 1.476.732.100
2	ATB Lainnya	Rp -
Jumlah Nilai Perolehan per 30 Juni 2026		Rp 1.476.732.100

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	Rp 1.476.732.100
Mutasi tambah:	Rp -
Likuidasi Masuk	Rp -
Saldo per 30 Juni 2026	Rp 1.476.732.100
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2026	Rp (1.476.732.100)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	Rp -

Penggunaan Aset tak Berwujud berupa *software* sebesar Rp1.476.732.100,00 yang dicatat sebagai aset dengan sumber daya jangka panjang yang biasanya tidak memiliki keberadaan fisik namun memiliki nilai atau jumlah manfaat di masa depan yang tidak diketahui (tidak terbatas).

Aset Tak Berwujud pada BPSDM Hukum sebesar Rp1.476.732.100,00 berupa :

1. CBHRIS BPSDM, Mengelola data kompetensi pegawai Kementerian Hukum Rp31.000.000,00
2. Aplikasi CBT BPSDM, Pelaksanaan ujian Diklat berbasis IT Rp2.000.000,00
3. Video Conference, Pelaksanaan Wawancara Online Rp48.875.000,00
4. Aplikasi Barcode, Membuat *barcode* BMN untuk DIR Rp88.350.000,00
5. Internet Controller, Monitoring Jaringan internet di lingkungan BPSDM Hukum Rp83.900.000,00.
6. Aplikasi SIEVA, Evaluasi Diklat berbasis IT Rp88.800.000,00
7. BPSDM BOX, Penyimpanan data online (*Online Storage*) Rp90.090.000,00
8. E-learning Metode pembelajaran Rp87.780.000,00
9. E-regis, Aplikasi registrasi pelaksanaan diklat secara elektronik Rp90.502.000,00
10. Jadwal, Monitor jadwal Widyaiswara pada Pelaksanaan Belajar Mengajar Rp93.857.000,00
11. E-sertifikat, Aplikasi Sertifikat Digital Rp88.660.000,00

12. Digital Library, Berisi *e-book* yang dapat diakses pegawai dan peserta diklat Rp82.445.000,00
13. Webinar Kemenkumham, Aplikasi Pendukung proses pembelajaran e-learning Rp50.593.500,00
14. Aplikasi Uji Kompetensi BPSDM Hukum, Untuk melakukan kegiatan Uji Kompetensi Rp96.500.000,00
15. Buku Elektronik, Berisi *e-book* yang dapat diakses pegawai dan peserta diklat Rp67.000.000,00
16. Modul Rumah Belajar Kemenkumham, Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kemenkumham Rp288.300.000,00
17. *E-Report* sebesar Rp98.079.600,00.

C.21 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

*Dana Yang
Dibatasi
Penggunaannya
Rp0,00*

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berasal dari dana yang ditentukan untuk membiayai belanja modal yang merupakan hak pemerintah dalam hal ini berasal dari RPATA sebesar nilai dana yang dibatasi penggunaannya. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.

C.22 Aset Lain-Lain

*Aset Lain-Lain
Rp2.522.415.500,
00*

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional BPSDM Hukum serta dalam proses usulan penghapusan ke Sekretariat Jenderal dari BMN. Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp2.522.415.500,00. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 01 Januari 2026	8.418.770.029
Mutasi tambah:	653.060.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	653.060.000
Mutasi kurang:	6.549.414.529
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	6.549.414.529
Saldo per 30 Juni 2026	2.522.415.500
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2026	(2.522.415.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2026	-

Mutasi tambah sebesar Rp653.060.000,00 merupakan Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya berupa 1 unit *Sound System* pada BPSDM Hukum sebesar Rp653.060.000,00.

Mutasi Kurang sebesar Rp6.549.414.529,00 merupakan pencatatan barang yang mau dihapuskan berupa dengan rincian berupa 6 buah Mesin Ketik Listrik senilai Rp18.600.000,00; berupa 8 buah Mesin Ketik

Elektronik/Selektrik senilai Rp27.280.000,00; berupa 16 buah Mesin Hitung Elektronik/Calculator senilai Rp8.894.000,00; berupa 2 buah Mesin Penghitung Uang senilai Rp37.100.000,00; berupa 15 buah Lemari Besi/Metal senilai Rp85.390.000,00; berupa 4 buah Rak Besi senilai Rp39.100.000,00; berupa 8 buah Rak Kayu senilai Rp. 34.650.000,00; berupa 9 buah Filing Cabinet Besi senilai Rp17.190.000,00; berupa 3 buah Peti Uang/Cash Box/Coin Box senilai Rp459.000,00; berupa 4 buah CCTV/Camera Control Television System senilai Rp465.950.325,00; berupa 1 buah Alat Penghancur Kertas senilai Rp46.800.000,00; berupa 54 buah LCD Projector/Infocus senilai Rp537.916.096,00; berupa 7 buah Perkakas Kantor Lainnya senilai Rp224.196.000,00; berupa 23 buah Meja Kerja Besi/Metal senilai Rp42.630.000,00; berupa 27 buah Meja Kerja Kayu senilai Rp75.551.800,00; berupa 205 buah Kursi Besi/Metal senilai Rp147.963.000,00; berupa 2 buah Kursi Kayu senilai Rp19.800.000,00; berupa 335 buah Kasur/*Spring Bed* senilai Rp407.192.500,00; berupa 16 buah Kursi Fiber Glas/Plastik senilai Rp16.068.800,00; berupa 3 buah Mesin Penghisap Debu/*Vacuum Cleaner* senilai Rp20.400.000,00; berupa 45 buah A.C. Split senilai Rp453.039.768,00; berupa 5 buah Kipas Angin senilai Rp23.750.000,00; berupa 30 buah Televisi senilai Rp103.042.500,00; berupa 5 buah Loudspeaker senilai Rp26.862.000,00; berupa 5 buah Sound System senilai Rp301.828.000,00; berupa 5 buah Microphone senilai Rp6.737.500,00; berupa 21 buah Dispenser senilai Rp38.940.000,00; berupa 7 buah Coffee Maker senilai Rp98.000.000,00; berupa 4 buah Camera Electronic senilai Rp50.215.000,00; berupa 26 buah Slide Projector senilai Rp547.690.000,00; berupa 100 buah Handy Talky (HT) senilai Rp201.116.250,00; berupa 86 buah P.C Unit senilai Rp1.033.055.400,00; berupa 91 buah Laptop senilai Rp1.289.847.000,00; berupa 21 buah Notebook senilai Rp237.051.000,00; berupa 30 buah Printer (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp95.208.590,00; dan berupa 12 buah Scanner (Peralatan Personal Komputer) senilai Rp189.900.000,00.

Rincian Aset Lain-lain tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

<i>Akumulasi</i>	Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni
<i>Penyusutan</i>	2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.986.887.650,00 dan

dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp3.986.887.650
,00

Rp9.883.242.179,00. Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
A	Aset Lain-lain	1.476.732.100	1.476.732.100	-
1	Software Komputer	2.522.415.500	2.522.415.500	-
2	ATB Lainnya	-	-	-
Total		3.999.147.600	3.999.147.600	-

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp1.567.237.817,
00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.567.237.817,00 dan Rp3.015.138.113,00. Rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah
1	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	1.294.058.287
2	Belanja barang yang masih harus dibayar	166.750.500
3	Belanja modal yang masih harus dibayar	45.850.770
4	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	60.578.260
Total		1.567.237.817

Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1.567.237.817,00 terdiri dari :

- Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar (212111) senilai Rp1.294.058.287,00 yang merupakan Belanja Gaji Pegawai Periode Juli 2026 yang sudah SP2D pada Juni 2026 dan dibayarkan pada Juli 2026.
- Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar (212112) senilai Rp166.750.500,00 merupakan Pembayaran Belanja Barang SPP belum SP2D berupa pembayaran belanja makan peserta & panitia, pemeliharaan gedung, pemeliharaan halaman, sewa pengharum ruangan.
- Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar (212113) senilai Rp45.850.770,00 merupakan Pembayaran belanja modal SPP belum SP2D atas Pengadaan PC Komputer untuk Belanja Modal

Peralatan dan Mesin Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Sekretariat BPSDM Hukum TA 2026, Kuitansi Nomor 07/KWI/BPSDM/KC-JKT/VI/2026 tanggal 09 Juni 2026 (02002600209464812).

- d. Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya (212191) senilai Rp60.578.260,00 merupakan saldo di rekening bendahara atas pembayaran yang sudah SP2D namun belum didistribusikan ke penerima.

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp74.269.440,00

Utang yang belum ditagihkan merupakan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Nilai Utang Yang belum ditagihkan pada BPSDM Hukum sebesar Rp74.269.440,00 merupakan nilai BAST/SPBy yang belum SPP dan akan dilakukan pembayaran oleh Bendahara saat proses SPP GUP.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00

Pendapatan Diterima di Muka sampai dengan 30 Juni 2026 merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBP. Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.

C.27 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp300.000.000,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp300.000.000,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.28 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka
Pendek Lainnya
Rp0,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke rekening kas negara.

C.29 Ekuitas

Ekuitas
Rp823.749.765.
062,00

Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp823.749.765.062,00.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni TA 2026 dan 30 Juni TA 2025 adalah sebesar Rp1.090.413.635,00 dan Rp46.666.688,00. Berikut rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak pada 30 Juni 2026.

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
per 30 Juni 2026*

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200.786.071
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	109.429.964
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	780.197.600
Jumlah	1.090.413.635

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.090.413.635,00 terdiri dari :

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp200.786.071,00 merupakan pendapatan sewa asrama, auditorium, kelas, kantin, dan ATM BRI;
- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi (425151) sebesar Rp109.429.964,00 merupakan pendapatan atas sewa kamar asrama sebesar Rp104.564.964,00 dan sewa kamar flat Rp4.865.000,00.
- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya (425429) sebesar Rp780.197.600,00 merupakan pendapatan atas pelaksanaan penilaian kompetensi kepada pegawai di lingkungan Kementerian/Lembaga yang diselenggarakan oleh Pusat Penilaian Kompetensi BPSDM Hukum.

Perbandingan PNB-LO dengan PNB-LRA

Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih	NAIK (TURUN) %
1.090.413.635	1.599.034.776	-508.621.141	(414,39)

Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA
Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal 30 Juni 2026

URAIAN	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	28.160.000	(28.160.000)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	175.800.250	(175.800.250)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	200.786.071	183.375.000	17.411.071
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	109.429.964	109.429.964	-
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	-	-	-
Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	780.197.600	780.197.600	-
Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	-	-
Pendapatan dari Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	28.186.280	- 28.186.280
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	293.865.682	- 293.865.682
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	20.000	- 20.000
Jumlah	1.090.413.635	1.395.074.526	(508.621.141)

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp13.538.485.082,
00

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp13.538.485.082,00 dan Rp12.854.060.967,00.

*Rincian Beban Pegawai
per 30 Juni 2026*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2026
Beban Gaji Pokok PNS	8.292.696.440
Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	(573)
Beban Pembulatan Gaji PNS	114.562
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	506.198.680
Beban Tunj. Anak PNS	142.844.691
Beban Tunj. Struktural PNS	203.170.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.209.816.000
Beban Tunj. PPh PNS	179.052.150
Beban Tunj. Beras PNS	379.842.900
Beban Uang Makan PNS	743.683.000
Beban Tunjangan Umum PNS	156.880.000
Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	(740.000)
Beban Gaji Pokok PPPK	774.230.994
Beban Pembulatan Gaji PPPK	14.280
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	32.806.790
Beban Tunjangan Anak PPPK	10.120.862
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	55.575.000
Beban Tunjangan Beras PPPK	38.949.890
Beban Uang Makan PPPK	86.961.000
Beban Tunjangan Umum PPPK	13.135.416
Beban Uang Lembur	671.007.000
Beban Uang Lembur PPPK	42.126.000
Jumlah	13.538.485.082

D.3 Beban Persediaan

*Beban
Persediaan
Rp410.588.737,
00*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Realisasi Beban Persediaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar Rp410.588.737,00 dan Rp354.960.790,00 sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan
per 30 Juni 2026*

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2026
Beban Persediaan Konsumsi	410.588.737
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	-
Jumlah Beban Persediaan	410.588.737

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa

Rp17.392.630.487,
00

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan belanja jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan jasa pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp17.392.630.487,00 dan Rp15.762.735.211,00. Rincian Beban Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2026

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026
Beban Keperluan Perkantoran	8.867.168.753
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	83.280.000
Beban Barang Operasional Lainnya	105.240.240
Beban Bahan	1.671.596.650
Beban Honor Output Kegiatan	181.600.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	439.952.898
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6.655.000
Beban Langganan Listrik	1.588.751.423
Beban Langganan Telepon	4.360.667
Beban Langganan Air	86.171.000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1.416.434.996
Beban Jasa Konsultan	98.000.000
Beban Sewa	1.813.218.860
Beban Jasa Profesi	1.027.800.000
Beban Jasa Lainnya	2.400.000
Jumlah	17.392.630.487

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan

Rp3.865.362.483,
00

Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp3.865.362.483,00 dan Rp7.729.014.367,00. Rincian beban pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni 2026

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.190.183.026
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	466.444.080
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	208.735.377
Jumlah	3.865.362.483

D.6 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan Dinas
Rp1.515.896.409,
00*

Beban Perjalanan Dinas adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp1.515.896.409,00 dan Rp628.050.509,00. Rincian Beban perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2026

Uraian Jenis Beban	Realisasi 30 Juni 2026
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.359.761.409
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	- 1.720.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.150.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154.705.000
Jumlah	1.515.896.409

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp0,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00.

D.8 Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial
Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban
Penyusutan dan
Amortisasi
Rp10.414.216.129,
00

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp10.414.216.129,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni 2026*

Uraian Beban Penyusutan Dan Amortisasi	Realisasi 30 Juni 2026
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.953.307.122
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.435.071.142
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	420.562
Beban Penyusutan Irigasi	13.157.353
Beban Amortisasi Software	12.259.950
Jumlah	10.414.216.129

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
tertagih
Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp144.696,00.

D.11 Beban Lain-Lain

Beban Lain-lain
Rp0,00

Jumlah Beban Lain-lain untuk pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp526.032.212,00

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp526.032.212,00 dan Rp478.027.328,00 dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni 2026*

Uraian	Realisasi 30 Juni 2026
Pendapatan Pelepasan Aset :	203.960.250
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	28.160.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	175.800.250
Beban Pelepasan Aset :	-
Kerugian Pelepasan Aset	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya :	322.071.962
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang	28.186.280
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	293.865.682
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	20.000
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	526.032.212

*) *Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2021.*

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

- Realisasi Pendapatan Pelepasan Aset sebesar Rp370.686.750,00 terdiri dari :
 - a. Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (425121) sebesar Rp28.160.000,00 merupakan pendapatan dari penjualan bongkaran renovasi eks Gedung POLTEKPIN.
 - b. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (425122) sebesar Rp175.800.250,00 merupakan pendapatan dari penjualan 2 unit mini bus dan 2 unit sepeda motor.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya didapat dari:

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (425911) sebesar Rp28.186.280,00 yang merupakan pengembalian atas temuan audit BPK berupa Uang Makan Pegawai TA. 2025.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (425912) sebesar Rp293.865.682,00 merupakan penyetoran kembali ke Kas Negara atas Temuan Pemeriksaan BPK atas Kelebihan Pembayaran jasa tenaga alih daya PT.Soegitos, serta pengembalian perjalanan dinas TA.2025.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) sebesar Rp20.000,00 merupakan kekurangan pengembalian ke kas negara atas pembayaran Jasa Konsultansi yang tidak Sesuai Kontrak pada Pembangunan Gedung Rektorat BPSPDM Hukum dan

D.13 POS-POS LUAR BIASA

<i>Pos-Pos Luar Biasa</i> <i>Rp0,00</i>	Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos-Pos Luar Biasa untuk 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00.
--	---

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp1.099.958.342.006,00

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal adalah jumlah ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan pada awal periode akuntansi. Nilai ekuitas pada tanggal 01 Januari 2026 dan 01 Januari 2025 adalah sebesar Rp1.099.958.342.006,00 dan Rp0,00.

Surplus/Defisit

LO

(Rp45.520.733.480,00)

E.2 Surplus/Defisit LO

Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Jumlah Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah defisit sebesar (Rp45.520.733.480,00) dan (Rp48.372.828.972,00).

Dampak

Kumulatif

Perubahan

Kebijakan

Akuntansi/Kesalahan

Mendasar
Rp0,00

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0,00

E.4 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,00

E.5 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

Koreksi

Reklasifikasi

Aset (Rp0,00)

E.6 Koreksi Reklasifikasi Aset

Reklasifikasi aset adalah pemindahan kelompok aset tetap ke aset lainnya. Koreksi reklasifikasi aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.7 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi
Aset
Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset. Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.8 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp0,00

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah penyesuaian nilai aset tetap selain dari hasil revaluasi (penilaian kembali aset tetap). Koreksi ini bisa berupa penambahan atau pengurangan nilai aset tetap, dan biasanya disebabkan oleh kesalahan pencatatan, perubahan estimasi umur manfaat, atau kerusakan aset. Koreksi Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.9 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain
Rp0,00

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.10 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp241.102.059.
593,00

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp241.102.059.593,00 dan Rp1.125.351.888.493,00.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	40.411.066.389
Diterima dari Entitas Lain	- 1.599.034.776
Transfer Keluar	- 279.929.319.740
Transfer Masuk	15.228.534
Jumlah	(241.102.059.593)

E.11 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL/ DKEL
(Rp1.599.034.776,

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi

00)/
Rp40.411.066.389,
00

antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2026, DDEL sebesar (Rp1.599.034.776,00) sedangkan DKEL sebesar Rp40.411.066.389,00.

E.12 Transfer Masuk/Transfer Keluar

*Transfer
Masuk/Transfer
Keluar
Rp15.228.534,00/
Rp279.929.319.740
,00*

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.
Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp15.228.534,00 dan Rp279.929.319.740,00.

*Pengesahan
Hibah Langsung
dan
Pengembalian
Pengesahan
Hibah Langsung
Rp0,00*

E.13 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 adalah Rp0,00.

E.14 Ekuitas Akhir

*Ekuitas Akhir
Rp813.335.548.933
,00*

Ekuitas akhir adalah total ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan di akhir suatu periode akuntansi, setelah semua penambahan dan pengurangan dihitung. Nilai ekuitas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp813.335.548.933,00 dan Rp1.076.979.059.521,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Pengungkapan Lain-Lain

1. Tanah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum sudah terkoreksi sebesar 3.420 m² akibat pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari tetapi belum tercatat pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Terkait penggantian tol dengan nilai appraisal sebesar Rp25.248.900.000,00. Saat ini masih dalam tahap perencanaan pembangunan dan penunjukan konsultan perencanaan pembangunan.
2. BPSDM Hukum sedang melakukan proses peralihan nama sertifikat tanah untuk memenuhi ketentuan sertifikat, saat ini masih dalam proses menunggu berita acara hasil pengukuran tanah BPSDM Hukum yang telah dilakukan oleh BPN Depok.
3. Aset tanah pada BPSDM Hukum yang Sertifikatnya Belum Bersertifikat Sesuai Ketentuan (BBSK) atas nama Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dilakukan koordinasi ke BPN Depok untuk dilakukan permohonan pengukuran ulang melalui surat Nomor SDM.1-PB.04.01-02 tanggal 14 Maret 2023.

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 13
SATUAN KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 693160

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 9:47 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	979,150,000	1,599,034,776	619,884,776	163	1,078,539,000	539,487,205	539,051,795	50
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	979,150,000	1,599,034,776	619,884,776	163	1,078,539,000	539,487,205	539,051,795	50
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	979,150,000	1,599,034,776	619,884,776	163	1,078,539,000	539,487,205	539,051,795	50
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	89,591,794,000	40,411,066,389	(49,180,727,611)	45	201,688,529,000	37,569,984,503	164,118,544,497	19
1. Belanja Pegawai	23,127,834,000	12,244,426,795	(10,883,407,205)	53	21,831,019,000	11,644,923,473	10,186,095,527	53
2. Belanja Barang	50,165,335,000	23,126,228,939	(27,039,106,061)	46	122,491,339,000	23,726,491,680	98,764,847,320	19
3. Belanja Modal	16,298,625,000	5,040,410,655	(11,258,214,345)	31	57,366,171,000	2,198,569,350	55,167,601,650	4
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM 135
ESELON I : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 13
SATUAN KERJA : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM 693160

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM
Tgl Cetak : 28/07/26 9:47 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	89,591,794,000	40,411,066,389	(49,180,727,611)	45	201,688,529,000	37,569,984,503	164,118,544,497	19
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

JUSMAN ALI
NIP 197405102000121001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:47 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2025	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0	300,000,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	60,578,260	0	60,578,260	0.00
Persediaan	408,064,702	516,009,615	(107,944,913)	(20.92)
JUMLAH ASET LANCAR	768,642,962	516,009,615	252,633,347	48.96
ASET TETAP				
Tanah	687,998,681,000	687,998,681,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	120,087,627,319	120,051,282,924	36,344,395	0.03
Gedung dan Bangunan	125,594,619,872	424,753,091,148	(299,158,471,276)	(70.43)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3,675,485,543	13,275,880,497	(9,600,394,954)	(72.31)
Aset Tetap Lainnya	1,468,896,867	1,468,896,867	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6,172,015,039	1,775,158,009	4,396,857,030	247.69
AKUMULASI PENYUSUTAN	(130,488,912,412)	(149,569,562,723)	19,080,650,311	(12.76)
JUMLAH ASET TETAP	814,508,413,228	1,099,753,427,722	(285,245,014,494)	(25.94)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	1,476,732,100	1,476,732,100	0	0.00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	2,709,193,903	(2,709,193,903)	(100.00)
Aset Lain-lain	2,522,415,500	8,418,770,029	(5,896,354,529)	(70.04)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(3,999,147,600)	(9,883,242,179)	5,884,094,579	(59.54)
JUMLAH ASET LAINNYA	0	2,721,453,853	(2,721,453,853)	(100.00)
JUMLAH ASET	815,277,056,190	1,102,990,891,190	(287,713,835,000)	(26.08)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,567,237,817	3,015,138,113	(1,447,900,296)	(48.02)
Utang Yang Belum Ditagihkan	74,269,440	0	74,269,440	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	17,411,071	(17,411,071)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	300,000,000	0	300,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,941,507,257	3,032,549,184	(1,091,041,927)	(35.98)
JUMLAH KEWAJIBAN	1,941,507,257	3,032,549,184	(1,091,041,927)	(35.98)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	813,335,548,933	1,099,958,342,006	(286,622,793,073)	(26.06)
JUMLAH EKUITAS	813,335,548,933	1,099,958,342,006	(286,622,793,073)	(26.06)
JUMLAH EKUITAS	813,335,548,933	1,099,958,342,006	(286,622,793,073)	(26.06)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	815,277,056,190	1,102,990,891,190	(287,713,835,000)	(26.08)

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

**SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM**

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:47 PM

Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA
KPA

JUSMAN ALI

NIP 197405102000121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:34 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:48 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	40,411,066,389
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	1,599,034,776	0
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	28,160,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	175,800,250
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	183,375,000
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	109,429,964
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	780,197,600
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,186,280
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	293,865,682
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,000
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	7,392,922,280	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	102,205	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	451,676,950	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	127,263,533	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	181,440,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,076,182,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	173,918,056	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	338,708,340	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	743,683,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	140,675,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	685,163,594	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	12,778	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	29,007,820	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	8,947,546	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	49,400,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	34,459,850	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	86,961,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	11,510,416	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	671,007,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	42,126,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	8,866,236,153	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	83,280,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	99,122,240	0
3.0	521211	Belanja Bahan	1,628,223,050	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	179,800,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	438,200,208	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,655,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:34 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:48 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	91,635,597	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	1,872,546,987	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,220,313	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	107,460,000	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,416,434,996	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	98,000,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,795,799,660	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	1,025,100,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	2,400,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,049,119,726	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	391,362,520	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	466,444,080	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,347,053,409	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,150,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154,705,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	643,553,625	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4,396,857,030	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	573
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	740,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	1,720,000
JUMLAH			42,012,561,738	42,012,561,738

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

JUSMAN ALI

197405102000121001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:48 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	300,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	60,578,260	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	294,230,996	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	113,833,706	0
0.0	131111	Tanah	687,998,681,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	120,087,627,319	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	125,594,619,872	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	1,733,697,243	0
0.0	134112	Irigasi	831,972,000	0
0.0	134113	Jaringan	1,109,816,300	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,468,896,867	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	6,172,015,039	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	81,719,763,985
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	45,701,585,854
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1,694,584,934
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	226,733,739
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	1,109,816,300
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	36,427,600
0.0	162151	Software	1,476,732,100	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	2,522,415,500	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	2,522,415,500
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,476,732,100
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	1,294,058,287
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	166,750,500
0.0	212113	Belanja modal yang masih harus dibayar	0	45,850,770
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	60,578,260
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	74,269,440
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	300,000,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	40,411,066,389
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,599,034,776	0
0.0	313211	Transfer Keluar	279,929,319,740	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	15,228,534
0.0	391111	Ekuitas	0	1,099,958,342,006
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	28,160,000
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	175,800,250
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	200,786,071
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	109,429,964
3.0	425429	Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	780,197,600

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:48 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	28,186,280
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	293,865,682
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	20,000
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	8,292,696,440	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	113,989	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	506,198,680	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	142,844,691	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	203,170,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,209,816,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	179,052,150	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	379,842,900	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	743,683,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	156,140,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	774,230,994	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	14,280	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	32,806,790	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	10,120,862	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	55,575,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	38,949,890	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	86,961,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	13,135,416	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	671,007,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	42,126,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	8,867,168,753	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	83,280,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	105,240,240	0
3.0	521211	Beban Bahan	1,671,596,650	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	181,600,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	439,952,898	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	6,655,000	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	1,588,751,423	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,360,667	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	86,171,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	1,416,434,996	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	98,000,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,813,218,860	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	1,027,800,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:48 PM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	2,400,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3,190,183,026	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	466,444,080	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	1,358,041,409	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,150,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	154,705,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7,953,307,122	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,435,071,142	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	420,562	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	13,157,353	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	12,259,950	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	410,588,737	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	208,735,377	0
JUMLAH			1,278,430,650,045	1,278,430,650,045

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

JUSMAN ALI

NIP 197405102000121001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM
ESELON I : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM
 Tgl Cetak : 28/07/26 9:46 PM
 Halaman : 1
 lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,090,413,635	46,666,688	1,043,746,947	2,236.6
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,090,413,635	46,666,688	1,043,746,947	2,236.6
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,090,413,635	46,666,688	1,043,746,947	2,236.6
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	13,538,485,082	12,854,060,967	684,424,115	5.325
Beban Persediaan	410,588,737	354,960,790	55,627,947	15.672
Beban Barang dan Jasa	17,392,630,487	15,762,735,211	1,629,895,276	10.34
Beban Pemeliharaan	3,865,362,483	7,729,014,367	(3,863,651,884)	(49.989)
Beban Perjalanan Dinas	1,515,896,409	628,050,509	887,845,900	141.365
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

ESELON I : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:41 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:46 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	10,414,216,129	11,568,845,840	(1,154,629,711)	(9.981)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	(144,696)	144,696	(100)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	47,137,179,327	48,897,522,988	(1,760,343,661)	(3.6)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(46,046,765,692)	(48,850,856,300)	2,804,090,608	(5.74)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	203,960,250	341,436,000	(137,475,750)	(40.264)
Pendapatan Pelepasan Aset	203,960,250	341,436,000	(137,475,750)	(40.264)
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	322,071,962	136,591,328	185,480,634	135.792
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	322,071,962	136,591,328	185,480,634	135.792
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	526,032,212	478,027,328	48,004,884	10.042
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(45,520,733,480)	(48,372,828,972)	2,852,095,492	(5.896)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(45,520,733,480)	(48,372,828,972)	2,852,095,492	(5.896)

Keterangan :
FINAL

DEPOK, 28 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

JUSMAN ALI
NIP 197405102000121001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (135) KEMENTERIAN HUKUM

UNIT ORGANISASI : (13) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (693160) BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM

Tgl Data : 28/07/26 6:34 PM

Tgl Cetak : 28/07/26 9:46 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	1,099,958,342,006	0	1,099,958,342,006	0
SURPLUS/DEFISIT-LO	(45,520,733,480)	(48,372,828,972)	2,852,095,492	(5.9)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(241,102,059,593)	1,125,351,888,493	(1,366,453,948,086)	(121.42)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(286,622,793,073)	1,076,979,059,521	(1,363,601,852,594)	(126.61)
EKUITAS AKHIR	813,335,548,933	1,076,979,059,521	(263,643,510,588)	(24.48)

Keterangan :

FINAL

DEPOK, 28 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

JUSMAN ALI

NIP 197405102000121001